

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Baubaupost.com
Post

JUMAT
01 Desember 2023

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Mengadakan Pelatihan Membatik di Kota BauBau, Narasumber Berasal dari Universitas Indonesia dan Universitas Halu Oleo



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Inovasi dan Kreasi Kriya Bagi SDM Ekraf Sub Sektor Kriya di Kota Baubau Tahun 2023 yang diikuti 40 org berasal dari pelaku ekonomi kreatif yang berada di beberapa wilayah daerah sekitar yaitu Kota Baubau, Buton Tengah, Buton Selatan, Kabupaten Buton

Kesbangpol Baubau Sosialisasikan P4GN di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa, Lagi Marak Pelajar Mabuk Karena Suka Menghirup Lem



Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 28-30 November 2023 bertempat di Nirwana Buton Villa dengan

Lanjutan ke Hal: 7

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Badan Kesatuan Bangsa Kota Baubau menggelar Sosialisasi Pencegahan, pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika (P4GN) bagi pelajar dan mahasiswa Tingkat Kota Baubau tahun 2023, di Hotel Galaxy Inn, Selasa 29 November 2023.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yaitu Kepala Kesbangpol Kota Baubau Drs Amaluddin

Lanjutan ke Hal: 7

Dr Muh Rasman Manafi Aklamasi
Terpilih Nakhkodai Ketua Umum
HAPPI dalam Kongres Nasional di
Pontianak



Laporan: Andina L

PONTIANAK, BP- Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) hari ini dalam Kongres Nasional IV di Pontianak Kalimantan Barat secara aklamasi mengamanahkan Dr Muh Rasman Manafi SP Msi sebagai Ketua Umum dengan suara bulat.

Dr Muh Rasman Manafi akan memimpin

organisasi para ahli ini sampai 5 tahun ke depan sesuai AD/ART organisasi HAPPI.

Munculnya nama Pj Wali Kota Baubau di forum nasional ini menyedot perhatian penuh para peserta Kongres yang berasal dari belasan provinsi.

Sejak berdiri tahun 2004 organisasi ini sul-

Lanjutan ke Hal: 7

Pj Wali Kota Baubau : Saya
Mengajak Anggota Korpri Jadi
Agen Aktif Percepatan Delapan
Program Prioritas



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP- Organisasi Korpri hari ini genap berusia 52 tahun pada 29 November 2023. Sebagai wadah bagi pegawai Republik Indonesia, Korpri memiliki kekuatan besar untuk menjadi penentu menjadikan Kota Baubau, negeri khalifatul khamis- terus tumbuh dan melaju dalam memaju-

kan Indonesia. Ditangan anggota Korpri mesin birokrasi bergerak, roda pemerintahan berjalan. program-program yang berkualitas dan bermanfaat, tidak dapat terlaksana dengan baik, tanpa kerja-kerja dari seluruh asn yang merupakan anggota Korpri.

Hal itu disampaikan Pj

Lanjutan ke Hal: 7

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA

PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



Andina Latief, SKM
DIREKTUR



Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Mengadakan Pelatihan Membatik di Kota BauBau, Narasumber Berasal dari Universitas Indonesia dan Universitas Halu Oleo

menghadirkan pe-materi Ibu Widhyas-maramurti, S.S., M.A Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI) dan Bapak Arie Toursino Hadi, M.Hum Dosen Fakuktas Ilmu Budaya Universitas Haluoleo (UHO)

Kegiatan Pelatihan Inovasi dan Krea-si Kriya bagi SDM Ekraf dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota BauBau, Bapak H Idrus Taufik Saidi, S.Kom.,M.Si dan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Dispar Busel Ibu Dina Ermita, SH selaku moderator.

Kabid Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Sri Resqina Ruspian Laydi, S.I.P., M.Si. mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mengenalkan seni batik tulis dan teknik pembuatannya kepada pelaku ekraf dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia ekonomi kreatif sub sektor kriya yang berkualitas dan berdaya saing.

“Selain itu, kegiatan ini juga mendorong pengembangan produk batik tulis yang inovatif, kreatif dan sesuai dengan permintaan pasar dan menciptakan peluang sumber pendapatan bagi sumber daya manusia ekonomi sub sektor kriya melalui peningkatan produktivitas dan nilai produk batik tulis.

“Kota Baubau dan daerah sekitarnya merupakan daerah yang telah dikenal dengan potensi wisata

alam dan wisata budayanya yang sangat strategis untuk dikembangkan, dikrenakan bukan hanya memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan, produktivitas dan kesempatan kerja bagi masyarakat asli di daerah tersebut,” kata Sri Resqina Ruspian Laydi, Selasa (29/11/2023).

Oleh karena itu melalui kegiatan ini, lanjutnya, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Dinas Pariwisata Kota Baubau telah melakukan sinergitas pada substansi kegiatan ini, sebagai bentuk penguatan EKRAF pada sub sektor kriya yaitu kriya batik.

Tujuan lainnya yaitu mendorong pengembangan produk batik tulis yang inovatif, kreatif dan sesuai dengan permintaan pasar. Juga dapat menciptakan peluang sumber pendapatan bagi sumber daya manusia ekonomi sub sektor kriya melalui peningkatan produktivitas dan nilai produk batik tulis.

“Manfaat pelaksanaan kegiatan Pelatihan ini yaitu sebagai bentuk pengembangan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat pelaku usaha ekonomi kreatif pada sub sektor kriya, khususnya kriya batik sehingga kedepannya Kota Baubau dan daerah lainnya bukan hanya dikenal dengan destinasi wisatanya saja, akan tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat maupun daerah,” ucapnya.

Narasumber Arie Toursino Hadi menilai pelatihan Kriya di

Kota Baubau pesertanya sangat antusias dan ide membuat motif batiknya sangat beragam. Arie Toursino Hadi mencontohkan saat melakukan canting terlihat peserta ada yang melukis motif naga, motif benteng, motif buah nenas, motif jeruk siompu dan juga kembang. “Saya juga jadi penasaran bagaimana nanti hasil membatiknya. Pokoknya motif-motif itu secara filosofis mencirikan daerah masing-masing dan itu beragam,” ungkap Arie Toursino Hadi.

Diakhir pelatihan nantinya, peserta dengan hasil karya terbaik, lanjut Arie Toursino Hadi, akan diberi hadiah berupa satu set alat canting beserta lilinnya. “Alat ini memang tidak ada di Baubau jadi kalau dijadikan hadiah itu sangat membantu peserta untuk meneruskan karyanya dalam membatik,” tuturnya.

Instruktur lainnya Dosen Jurusan Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Widhyas-maramurti, S.S., M.A mengatakan dia fokus memberikan pelatihan pewarnaan kain menjadi batik. Widhyas-maramurti pun menilai selama memberikan pelatihan hampir tidak menemui kesulitan dalam mengarahkan peserta.

Dia pun menjelaskan bagaimana proses membatik mulai dari melukis motifnya, mencanting, mewarnai hingga sampai dengan tahap akhir mencelupkan kain katun dalam bahan pewarna kimiawi lalu mencuci dan menjemurnya. Dalam pelatihan ini Widhyas-

maramurti menjelaskan pihaknya menggunakan pewarna berbahan kimiawi dan tidak menggunakan pewarna berbahan alami agar prosesnya lebih cepat.

“Kalau menggunakan bahan pewarna alami prosesnya makan waktu lama. Sementara dalam pelatihan ini waktunya terbatas. Alasan lainnya juga jika menggunakan pewarna alami hasilnya memang bagus tapi harganya sangat mahal,” kata Widhyas-maramurti.

Kadispar Baubau H.Idrus Taufik Saidi menyambut baik pelaksanaan Kriya (membatik-red) di Kota Baubau dan berharap pelatihan ini bisa dilakukan lagi ke tahap selanjutnya dan ada peserta yang bisa menekuni membatik untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga.

Sementara itu, salah satu peserta pelatihan Kriya Ibu Ani dari Burangasih, Busel yang membuat motif rumah adat yang digabung dengan bunga santa dan rompa mengatakan senang bisa ikut dalam pelatihan ini. Meskipun diawal awal kesulitan dalam proses mencanting, namun setelah melihat hasilnya rasa capeknya hilang. Dia pun berharap kegiatan seperti ini bisa kembali dilakukan dengan tahap selanjutnya.

Dari 40 orang peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, terpilih 10 orang peserta terbaik yang dipilih berdasarkan kriteria motif, efek cracking, stalagtit dan stalagmite, khas wilayah Kota Baubau, (*)

Kesbangpol Baubau Sosialisasikan P4GN di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa, Lagi Marak Pelajar Mabuk Karena Suka Menghirup Lem

MSi, Kasat Narkoba Polres Baubau dan BNN Kota Baubau. Dalam sambutannya Kepala Kesbangpol menekankan pentingnya kegiatan ini dengan sasaran pelajar dan mahasiswa karena kasus penyalahgunaan Narkoba terus menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.

“Adik-adik pelajar dan mahasiswa perlu mengetahui bahaya Narkoba karena bila mengkonsumsi barang haram ini maka berdampak pada penurunan kesehatan tubuh dan tentu berpengaruh pada penurunan prestasi belajar. Dan lebih parahnya lagi ada ketergantungan pada Narkoba karena barang ini menyerang sistem saraf pusat,” terang Amaluddin, ketika membuka kegiatan P4GN.

Dia pun memesan kepada para pame-tri agar memberikan pemahaman kepada para pelajar tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba tetapi jangan menakut-nakuti mereka, “Jangan

menakut-nakuti mereka, berikan pemahaman bahaya mengkonsumsi Narkoba, tapi pelajar dan mahasiswa perlu takut dengan bahaya Narkoba,” ucapnya dengan nada bercanda.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Baubau menekankan tugas kepolisian dalam menegakkan hukum terkait dengan penyalahgunaan Narkoba. Dia pun memperkenalkan jenis-jenis Narkoba yang biasa ditangani pihak Polres Baubau yang sudah beredar di Baubau yaitu Narkoba jenis shabu-shabu dan sudah ada juga jenis ganja.

“Bila polisi menangani kasus ini maka pelaku atau pederang selalu mendapatkan ancaman terberat. Misalnya selalu mendapatkan ancaman minimal 4 tahun dan paling berat hukuman mati. Kalau yang teringan itu ada di pasal 127/UU 35 tentang Narkotika dan Psikotropika yaitu yang hanya sebagai pengguna maka dilakukan rehabilitasi,”

jasalnya.

Dari BNN selain memperkenalkan jenis-jenis Narkoba juga menjelaskan Narkoba jenis I hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian. Selain itu, pihak BNN juga mengingatkan penyalahgunaan zat adiktif yang saat ini ramai dikalangan anak-anak dan remaja usia sekolah.

“Sekarang ini trend anak-anak dan pelajar menyalahgunakan zat adiktif seperti menghirup lem, bensin, dan kotoran sapi. Penyalahgunaan zat adiktif ini merusak sistem saraf pusat seperti otak dan sum-sum tulang belakang. Jadi ini harus dihindari. Kenapa pengguna zat adiktif ini tidak ditangkap oleh aparat? karena belum ada undang-undang yang mengatur hukuman penyalahgunaan zat adiktif. Jadi kita yang mesti aktif mensosialisasikan kepada keluarga, tetangga, teman terkait bahayanya agar tidak mengkonsumsi zat adiktif,” ucapnya. (*)

Dr Muh Rasman Manafi Aklamasi Terpilih Nakhkodai Ketua Umum HAPPI dalam Kongres Nasional di Pontianak

dah hadir di 11 provinsi dan sementara provinsi lainnya sudah mendapat mandat untuk segera hadir berkontribusi dalam upaya sinergitas dalam pembangunan nasional.

Dalam penjelasannya, Dr Muh Rasman Manafi menekankan 3 hal. Pertama, ingin melakukan revitalisasi peran HAPPI dalam

pembangunan nasional dimana 5 hingga 25 tahun kedepan pembangunan kemitriman atau kelautan menjadi arus utama.

Kedua, kepengurusan HAPPI yang belum terbentuk secara penuh di sejumlah daerah akan dipercepat agar dapat bekerja bersama untuk Indonesia. Ketiga, berbagai kebijakan yang ada saat ini sudah dikelola, sudah ditelaah dan sudah di

analisis oleh seluruh ahli-ahli dan akan segera diorganisir.

“HAPPI dipastikan mengambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan Indonesia dan kita ingin menggelorakan semangat membangun bangsa berbasis kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi penghela ekonomi Biru,” tegas Dr Muh Rasman. (*)

Pj Wali Kota Baubau : Saya Mengajak Anggota Korpri Jadi Agen Aktif Percepatan Delapan Program Prioritas

Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si yang diwakili Pj Sekda Kota Baubau Saido Bonsai, SP, M.Si saat upacara peringatan hari Korpri ke-52 tingkat Kota Baubau di halaman kantor Wali Kota Baubau Palagimata Rabu (29/11/2023).

Ditekankan, dengan jumlah, peranan krusial dan kedudukan strategis tersebut, Korpri sebagai organisasi maupun anggotanya secara individu, dapat hadir dan bermanfaat

bagi masyarakat, serta melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa.

“Saya ingin menitip dan mengajak kepada para anggota Korpri untuk menjadi agen aktif percepatan 8 (delapan) agenda prioritas nasional. yakni diantaranya dengan melakukan belanja yang berkualitas dan menjadi pelopor penggunaan produk lokal buatan anak negeri dengan kuantitas yang dimilikinya, warga korpri dapat menjadi

trigger bergeraknya perekonomian daerah, yang beresonansi terhadap program penanganan kemiskinan dan penggunaan produk lokal buatan anak negeri. Termasuk menjadi orang tua asuh dalam program penurunan angka stunting,” ujarnya.

Diingatkan peringatan HUT Korpri ke-52 menjelang berlangsungnya pesta demokrasi, seluruh anggota Korpri harus turut serta menyukseskan pemilu 2024 secara

berkualitas dan akuntabel. Menghadapi tahun politik saat ini, sebagai aparatur sipil negara, anggota Korpri harus berkomitmen menjaga netralitas dan profesionalismenya, agar tetap fokus dalam mengabdikan pada bangsa dan negara. serta melayani masyarakat secara adil dan impar-sial-tanpa diskriminasi.

Selain itu, harus aktif menjaga kondusifitas kerukunan sosial daerah, sekaligus menghidupkan jiwa korps

sebagai pemersatu bangsa. Netralitas itu tidak hanya melekat pada diri asn pada jam kerja semata, tetapi juga mengikat di luar jam kerja.

Lebih lanjut dijelaskan, dengan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh anggotanya, Korpri memiliki peluang besar untuk melakukan lompatan-lompatan yang lebih tinggi, syaratnya, anggota Korpri harus memiliki karakter responsif dan adaptif terhadap perubahan yang menuntut kelincahan dan fleksibilitas tinggi.

karenanya, di usia lebih dari setengah abad ini, harus menjadi momentum transformasi anggota Korpri menjadi ASN yang lincah, fleksibel, serta berorientasi hasil.

nyadari bahwa, para ASN perlu bersentuhan dan menguasai teknologi, karena teknologi yang berada ditangan yang tepat, itulah yang menciptakan perubahan dan kemajuan,” tutupnya.

Sementara itu, peringatan hari Korpri yang ke-52 tingkat Kota Baubau juga dirangkaikan dengan peringatan hari guru nasional tahun 2023. Juga dirangkaikan dengan agenda tambahan pemberian penghargaan kepada guru berprestasi dari Pemkot Baubau yang diserahkan oleh Pj Sekda Baubau Saido Bonsai, S.Sos, M.Si. (*)

DPRD Baubau Per November Hasilkan
Tujuh Perda



Laporan: Amat Jr

BAUBAU, BP-Se-
lama tahun 2023 ini,
DPRD Kota Baubau
produktif melahirkan
Peraturan Daerah alias
Perda.

Sampai akhir No-
vember 2023 sudah 7
Perda yang dihasilkan
oleh DPRD Kota Bau-
bau.

Hal ini diungkap-
kan Sekretaris DPRD
Kota Baubau Yaya
Wirayahan, S.STP,
M.KP ketika ditemui
di ruang kerjanya Se-
lasi (28/11/2023).

Menurut Yaya, 7
perda yang dituntaskan
oleh DPRD Kota Bau-
bau termasuk program
kumulatif terbuka ter-
kait Perda APBD pe-
rubahan APBD 2023,
Perda Pertanggung-
jawaban pelaksanaan
APBD Tahun Angga-

ran 2022. Sedangkan
untuk Perda usulan
dari Pemerintah Kota
Baubau itu ada 4 yaitu
Perda pengelolaan bar-
rang milik daerah, Per-
da pajak daerah dan
retribusi daerah, pen-
gelolaan Rusunawa.

Dibanding 2 tahun
terakhir tahun, pada ta-
hun 2023 ini lebih sig-
nifikan karena 2 tahun
yang lalu masih berha-
dapan dengan Covid19
sehingga untuk tahun
2021 itu hanya 4 Perda
yang dihasilkan oleh
DPRD Kota Baubau.
Kemudian, pada ta-
hun 2022 DPRD Kota
Baubau menghasilkan
5 Perda.

Namun demikian,
Yaya optimis bila ma-
sih memungkinkan
waktu masih ada be-
berapa Perda yang
akan dituntaskan
DPRD Kota Baubau

dan sekarang ini ma-
sih menunggu hasil
harmonisasi dari Ke-
menterian Hukum dan
Ham. Pasalnya, Perda
yang akan dituntas-
kan tersebut memang
sebelum dibahas di
DPRD Kota Baubau
harus dipastikan sudah
diharmonisasi di Ke-
mentrian Hukum dan
Ham agar tidak berten-
tangan dengan aturan
aturan yang ada dia-
tasnya, pasal per pasal
dan lain sebagainya.

“Memang kita
butuh petunjuk dan
rekomendasi dari Ke-
menterian Hukum dan
Ham,” ujarnya.

Ditambahkan, capa-
ian kinerja tersebut
tidak lepas dari kerja
keras pimpinan dan
anggota DPRD Kota
Baubau serta sinergis-
tas yang baik dengan
Pemkot Baubau. (*)

Sekda Baubau Saido Bonsai
Ingatkan ASN Tetap Netral



Sekda Baubau Saido Bonsai SSos MSi

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Sekretaris Daerah Kota Baubau Saido Bonsai, S.Sos, M.Si mengingatkan jajarannya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilu serentak yang akan digelar tahun 2024 mendatang.

“Semua ASN mesti
tetap menjaga ne-
tralitas, karena seka-
rang sudah mema-
suki tahun-tahun
politik,” ujarnya
saat apel gabungan
ASN lingkup Pem-
kot Baubau Senin
(27/11/2023)

Saido Bonsai men-
gatakan, regulasi ter-
kait hal ini telah diatur
dalam Undang-Un-
dang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur
Sipil Negara dan Su-
rat Keputusan Bersa-
ma (SKB) yang telah
dikeluarkan pemer-

intah. SKB dimak-
sud dikeluarkan oleh
Kementerian Pen-
dayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi, Kement-
erian Dalam Negeri,
Badan Kepegawaian
Negara, Komisi
Aparatur Sipil Negara
serta Badan Pengawas
Pemilu pada tahun
2022.

Regulasi yang ada
sudah cukup ketat
mengatur ASN, yang
harus dihindari oleh
ASN diantaranya
adalah larangan men-
gadakan kegiatan yang

mengarah kepada ke-
berpihakan terhadap
partai politik, calon
atau pasangan calon
yang menjadi peserta
Pemilu. Baik sebelum
pemilihan maupun
selama dan sesudah
masa kampanye.

Hal ini meliputi per-
temuan, ajakan, him-
bauan, seruan, dan
pemberian barang
kepada ASN dalam
lingkungan unit kerja,
anggota dan masyara-
kat.

Sedangkan terkait
hak pilih, ASN pada
kontestasi Pemilu

2024, Saido Bon-
sai mempersilahkan
ASN Pemkot Baubau
menggunakan hak
pilihnya sesuai den-
gan pilihan masing-
masing. “Kita tetap
memilih, yang tidak
boleh adalah melaku-
kan kegiatan-kegiatan
yang dilarang dalam
SKB yang telah dike-
luarkan pemerintah,”
ungkapnya.

Sementara itu, Ke-
pala Dinas Kominfo
Kota Baubau H Andi
Hamzah Machmud,
S.Sos, M.Si men-
egaskan, pihaknya
ikut mengambil peran
demi suksesnya pesta
demokrasi Pemilu ta-
hun 2024. Apalagi,
sudah arahan Pj Wali
Kota Baubau Dr Muh
Rasman Manafi, SP,
M.Si terkait peran
Kominfo dalam men-
suksekan Pemilu dan
Pemilukada tahun
2024.

Dalam konteks ko-
munikasi publik, ini
adalah salah satu ke-
wajiban Kominfo.
Semua ketentuan ter-
kait penyelenggaraan
Pemilu telah dan akan
terus Kominfo disem-
inasikan kepada
masyarakat luas. Dan
khusus untuk media
sosial, tidak semua
informasi yang bere-
dar itu valid dan butuh
kroscek dan klarifikasi
secara berlapis. (*)

Soal APBD 2024, Pemkot Baubau Cermati dan Dalam
Pemandangan Umum Fraksi DPRD

Laporan: Amat Jr

BAUBAU, BP-
Pemerintah Kota
(Pemkot) Baubau
mencermati secara
seksama dan mendal-
ami semua yang dis-
ampaikan oleh seluruh
Fraksi DPRD melalui
pemandangan umum
fraksi, baik itu berupa
pandangan, dukungan
dan apresiasi terha-
dap apa yang telah di-
lakukan oleh Pemkot
Baubau dalam pelak-
sanaan APBD Tahun
Anggaran 2024, serta
saran-saran, usul dan
harapan agar Pemkot
Baubau bekerja lebih
baik.

Pemkot Baubau me-
nyampaikan terima
kasih dan penghar-

gaan kepada seluruh
fraksi DPRD Kota
Baubau atas pandan-
gan terhadap berbagai
substansi yang tertu-
ang dalam Raperda
tentang APBD Kota
Baubau Tahun Ang-
garan 2024, yang telah
disampaikan Pj Wali
Kota Baubau pada
tanggal 25 November
yang lalu. Tentunya
merupakan masukan
sangat berharga dan
bermanfaat yang akan
menjadi bahan pem-
bahasan lebih lanjut
untuk penyempur-
naan Raperda tentang
APBD Tahun Angga-
ran 2024.

Hal ini diungkapkan
Pj Sekda Kota Baubau
Saido Bonsai, S.Sos,
M.Si saat memba-

cakan tanggapan/jaw-
aban Pemerintah atas
Pemandangan Umum
Fraksi terhadap Ra-
perda tentang APBD
Tahun Anggaran 2024
di ruang rapat DPRD
Kota Baubau Senin
(27/11/2023).

Menurut Saido Bon-
sai, APBD merupakan
dokumen anggaran
yang bersifat dina-
mis dan fleksibel ses-
uai dengan dinamika
pembangunan dan
perekonomian makro
dan sumber daya yang
tersedia, mengaloka-
sikan sumber daya
secara tepat sesuai
kebijakan pemerin-
tah. Oleh karena itu,
Pemkot Baubau terus
berusaha melaku-
kan perbaikan dalam

rancangan dan kebi-
jakan-kebijakan dalam
pelaksanaan APBD
agar momentum per-
tumbuhan ekonomi
dapat terjaga.

Atas nama Pemkot
Baubau, Saido Bon-
sai menyambut baik
persetujuan DPRD
Kota Baubau untuk
bersama-sama mem-
bahas Raperda tentang
APBD Kota Baubau
Tahun Anggaran 2024
secara mendalam, de-
tail, akurat, dan cermat
sehingga kewajiban
dan amanah mulia
yang diberikan oleh
rakyat dan masyara-
kat Kota Baubau dapat
diselesaikan secara
tepat waktu sesuai den-
gan jadwal yang telah
ditetapkan. (*)

gi-tingginya kepada
pimpinan dan anggota
DPRD yang menga-
gendakan acara ini
sehingga dapat terlak-
sana sesuai jadwal
yang telah ditetapkan,
keterangan lebih
rinci atas rancangan
APBD 2024 ini akan
dijelaskan lebih lan-

jut pada rapat-rapat
pembahasan RAPBD
2024 antara pemer-
intah daerah bersama
DPRD, kami berharap
pembahasan RAPBD
dapat dilakukan se-
cara konstruktif demi
mewujudkan Buton
Tengah Maju dan
sejahtera”, tutupnya.



Laporan: Ardi

BUTENG, BP-Pj
Bupati Buton Ten-
gah, Andi Muhammad
Yusuf menyampaik-
kan Rancangan Perda
APBD tahun 2024.
Penyampaian itu di-
paparkan langsung
dalam rapat paripur-
na DPRD Kabupaten
Buton Tengah, Rabu
(22/11/2023).

Dalam penjelas-
nya Pj Bupati, Andi
Muhammad Yusuf
mengatakan, memper-
timbang potensi
perekonomian yang
kita miliki, dengan
tetap memperhitun-
gkan risiko-risiko yang
akan datang, maka
asumsi dasar eko-
nomi makro sebagai

landasan penyusunan
RAPBD 2024 adalah
stabilitas ekonomi
makro akan terus di-
jaga, situasi kondusif
dan damai pada Pemi-
lu dan Pilkada serentak
2024 harus kita
wujudkan, implemen-
tasi beberapa undang-
undang baru juga akan
memberikan manfaat
positif pada penguatan
struktural, serta inflasi
akan tetap dijaga.

“Peran APBD akan
tetap di optimalkan un-
tuk memetigasi tekan-
an inflasi, baik akibat
perubahan iklim mau-
pun gejala ekster-
nal. Koordinasi yang
kuat antara anggota
forum tim pengenal-
dian inflasi daerah
akan dan harus tetap

terjaga”, ungkapnya.

Untuk mendorong
tercapainya pemban-
gungan secara makro
tahun 2024, diperlu-
kan langkah kebijakan
pengelolaan keuan-
gan yang inovatif dan
kreatif baik dari sisi
penerimaan daerah,
belanja daerah mau-
pun pembiayaan da-
erah guna merespon
dan melaksanakan
berbagai program dan
kegiatan pembangu-
nan yang menjadi ke-
butuhan masyarakat.

Prioritas belanja
daerah tahun 2024
difokuskan untuk
membiayai pelaksa-
naan urusan pemer-
intahan yang menjadi
kewenangan daerah
serta pembangunan

sarana dan prasarana
yang terkait langsung
dengan peningkatan
pelayanan publik,
pengendalian infla-
si, penurunan angka
stunting dan kemiski-
nan ekstrim, penga-
lokasi anggaran desa,
serta pendanaan alo-
kasi 60% bagi Pemilu

serentak tahun 2024.
Pada kesempatan ini,
saya menginstruksikan
kepada seluruh jajaran
OPD agar dalam men-
gelola APBD 2024
harus lebih cermat,
transparan, akuntabel
serta tepat sasaran.
“Terima kasih dan
apresiasi yang seting-

Pj Gubernur Sultra ABR Jadi Irup di HUT Korpri ke 52 Tahun 2023

Pewarta: Mashuri

KENDARI, BP- Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P), Dr. (H.C) Andap Budhi Reviyanto, S.I.K., M.H menjadi Inspektur Upacara (Irup), Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri Ke-52 Tahun 2023, Korpri pegawai Republik Indonesia mengusung tema “Korprikan Indonesia” di Halaman Kantor Gubernur Sultra, (Rabu, 29 September 2023)

Hadir dalam HUT Korpri Ke-52 tersebut, Forkopimda Sultra yaitu Kapolda Sultra diwakili Karo OPS Polda Sultra, Komandan Korem 143 Halu Oleo, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Kabinda Sultra, Kepala BNN Sultra, Dan Lanal Kendari diwakili Pasprog, Dan Lanud Halu Oleo, Pimti Pratama Prov. Sultra dan seluruh keluarga besar Korpri Sultra Prov. Sultra

Pemberian piagam penghargaan dan SK Pensiun serta dana pembinaan yang diberikan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada PNS yang telah bekerja penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD RI Tahun 1945 paling singkat 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun dalam SK Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 yang menerima piagam penghargaan pada HUT Korpri tahun 2023 yaitu: 30 tahun, Aswad Bambang Afriyanto dari Instansi Badan Pendapatan Daerah Prov. Sultra dan Susilawati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra, 20 Tahun, Dr. Malesa Widayawara Ahli Madya BPSDM Prov. Sultra dan Margerat Asriyani, Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sultra, 10 Tahun Muhammad Ewit Firman, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Prov. Sultra dan Heti Kusnai Said, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sultra

Kemudian, penerimaan kafilah Sultra MTQ VI Tingkat Nasional Tahun 2022, Nomor: 03/Kep-DH/MTQ VI/Korpri/XI/2022 tentang penetapan peserta terbaik I,II, III Harapan I, II dan III MTQ VI Korpri Tingkat Nasional Tahun 2022 di Prov. Sumatera Barat, pada HUT Korpri Ke-



52 Tahun 2023 yaitu Hizh Al-Qur'an terbaik II, Lalu Suharja Hambali dari Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, Hizhah Qur'an Harapan 1, Nur Asia dari Madrasah Aliyah Negeri Kab. Bombana, Lomba Adzan golongan Mu'Adzin Harapan 1, Jamal, Kementerian Agama Kota Bau-Bau, Lomba Khutbah Jum'at golongan Khatib harapan III, H. Syaifuddin Mustaming dari instansi Biro Kesra Pemerintah Daerah Kab. Kolaka dan Tartil Qur'an dari golongan Muratitil dari Harapan III, H. Hasanuddin dari instansi Kementerian Agama Kab. Konawe Selatan dan Penerima dana pembinaan atlet Sultra Pornas Korpri XVI, pada HUT Korpri Tahun 2023 yang diberikan langsung Pj. Gubernur Sultra didampingi Kepala BKD Sultra dan Plh. Sekda Prov. Sultra

Dalam arahannya Pj. Gubernur Sultra menyampaikan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri bahwa Korpri kembali lagi memperingati HUT ke-52 Tahun, saya atas nama Dewan Pengurus Korpri Nasional menyampaikan ucapan selamat Ulang Tahun kepada para anggota Korpri yang bertugas dengan baik yang ada di Indonesia serta perwakilan RI di luar negeri

Momentum Ulang Tahun ke-52, marilah kita jadikan sebagai upaya untuk meneguhkan Korpri sebagai penguat NKRI dan pelindung ASN

Lanjut, Saya Juga menyampaikan terima kasih, kepada Korpri dan seluruh ASN atas semua program yang bermanfaat ke masyarakat luas. Semua program tersebut, tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN

Dari keberhasilan In-

donesia melewati pandemi Covid-19 dengan baik sehingga dipuji khalayak internasional, hingga program-program terobosan dan reformasi struktural yang telah berdampak positif ke masyarakat luas adalah bagian dari kerja keras para ASN

Selain itu, peran aktif para ASN anggota Korpri dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar, sehingga inflasi terus kita kendalikan dan stunting secara bertahap dapat kita turunkan dan tahun 2024 sudah selesai target dapat mencapai 14% atau bahkan kurang dari itu, sekali lagi perkenankan saya mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian 4,4 Juta para ASN dan seluruh keluarga besar Korpri

Saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat, karena dua hal besar yaitu karena perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat yaitu ada dua faktor besar mengubah kehidupan ini harus disikapi oleh Korpri

Untuk saat ini dunia sudah digerakkan oleh AI (Artificial Intelligence)/IOT (Internet Of Thing), Big Data, Sistem dan Algoritma pemrograman, coding maupun verifikasi biometrik, sehingga kita tidak bisa lagi menggerakkan pemerintahan dengan cara-cara lama dengan pendekatan masa lalu

Kita harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan pendekatan yang paling update, digitalisasi dalam proses hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan

Harapan masyarakat terhadap Pemerintah semakin meningkat tajam sehingga masyarakat sangat ber-

harap

Pemerintah memberikan layanan yang lebih cepat, mudah dan akurat. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat

Bahwa semua negara maju sudah menerapkan sistem Meritokrasi dalam Birokrasi. Saya minta para pengurus Korpri yang rata-rata adalah Sekjen, Sesmen, Sekda dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi

Dalam sejarah kehidupan Korpri, ketika disandingkan dengan pemilu Presiden dan Pilkada. Ada dua event besar itu selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan Netralitas Korpri tahun 2024 akan berlangsung pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan 38 Gubernur/Wakil Gubernur dan 514 Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota. Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama

Selesai memberikan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri dilanjutkan arahan Pj. Gubernur 95 Sultra yaitu pertama melihat

Memberikan informasi sekaligus juga pertanggungjawaban saya selaku Pj. Gubernur yang

Pertama melihat dari esensi dan substansi apa yang disampaikan Ketua umum dewan pengurus Korpri saya selaku Pj. Gubernur sudah menghadirkan replikasi sistem surat masuk dan keluar sebagai amanah dari Perpres nomor 95 tahun 2018.

Jadi 5 tahun yang lalu Perpres itu sudah ada untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik, segera perlu disosialisasikan dengan baik

Mari kita kejar berbagai keteringgalan yang ada di tempat kita, Kedua berbicara

Pameran Bursa Kerja 2023, Komitmen Pemprov Sultra Perjuangkan Pekerjaan Bagi Rakyat Sultra



Pewarta: Nandar

KENDARI, BP- Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) membuka Pameran Bursa Kerja tahun 2023, bertempat di Atrium Lippo Plaza Kendari, Rabu (29/11/23).

Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Sultra tahun 2023 ini menyediakan 1.257 lowongan bagi calon tenaga kerja. “Alhamdulillah, terdapat 1.257 lowongan pekerjaan dari 25 perusahaan yang akan _menghire calon karyawannya. Saya apresiasi dan ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini, saya juga mendorong perusahaan lainnya untuk memberi kesempatan bagi Pencari Kerja,” ujar Andap.

Selanjutnya, Andap juga mengatakan bahwa sesuai amanat undang-undang, instansi pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 2% untuk penyandang disabilitas. Untuk perusahaan swasta 1% dari total alokasi kebutuhan perusahaan.

“Saat ini terdapat 2 dari 25 perusahaan yang menerima tenaga kerja disabilitas. Harapan kami, ke depan makin banyak perusahaan

yang dapat memfasilitasi Saudara-Saudara kita penyandang disabilitas untuk dapat bekerja seperti dicontohkan pada penerimaan PPPK Kemenkumham,” ujar pria yang juga menjabat Sekjen Kemenkumham itu.

Pada sambutannya, Pj Gubernur Sultra menyampaikan bahwa kegiatan Pameran Bursa Kerja 2023 ini merupakan wadah untuk mempertemukan pencari dengan pemberi kerja, disamping keberadaan Pemerintah Provinsi yang harus memfasilitasi kesempatan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal agar memiliki kesempatan kerja.

“Kegiatan Pameran Bursa Kerja ini sebagai komitmen dan langkah nyata untuk memperjuangkan lapangan pekerjaan bagi rakyat Sultra yang tentunya sesuai dengan bakat, minat, serta keahliannya. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menekan angka pengangguran di Bumi Anoa,” ujarnya.

Andap juga mengingatkan kepada para Kepala Perangkat Daerah untuk melaku-

kan 3 (tiga) langkah konkret guna meningkatkan lowongan pekerjaan dan menekan angka pengangguran di Sulawesi Tenggara.

“Pertama, identifikasi dan lakukan pendataan ketersediaan lowongan pekerjaan. Kedua, informasikan kepada masyarakat mengenai ketersediaan lowongan kerja yang ada. Ketiga, lakukan berbagai terobosan kreatif dalam rangka membekali keahlian dan keterampilan teknis bagi generasi muda melalui kegiatan pengembangan kreativitas,” pesan Andap.

Pj. Gubernur juga berharap kiranya bagi perusahaan yang membuka usaha di Sultra agar memprioritaskan para pencari kerja lokal Sultra untuk bekerja dan berkarir di perusahaan.

Turut hadir mendampingi yakni Plh Sekda Pemprov Sultra, Yuni Nurmawati, para Kepala Perangkat Daerah, Perwakilan perusahaan terkait dan para Pencari Kerja.(*)

konsep bekerja Pemerintahan Daerah di seluruh Kab/Kota se-Sultra dari kemarin dan hari ini kita membahas tentang fokus anggaran di dalam APBD tahun 2023 dan 2024, sehingga fokus saya adalah bagaimana kita memenuhi hak-hak konstitusional kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanah di dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia khususnya di dalam alinea ke-4 yaitu 1. Hak atas sandang pangan dan papan ini, tadi disebutkan seperti stunting ini menjadi perhatian kita semua, sama dengan kemiskinan ekstrim mari kita satukan langkah untuk meminimalisir bahkan

mengurangi

Hari ini saya akan menyampaikan pandangan, apa yang kita kerjakan kalau kita berbicara untuk legislasi tentang kebijakan Peraturan dengan politik anggaran dan politik pengawasan saya selaku Pj. Gubernur yang relatif singkat saya berupaya untuk melaksanakan termasuk juga hak-hak saudara, apakah sebagai ASN maupun sebagai PP3K

kita berikan penghargaan ini sebagai wujud apresiasi dan ucapan terima kasih, karena kita juga bermimpi seperti beliau selesai 38 tahun, 32 tahun, 21 tahun.

Harapannya kita juga seperti ini, perlu saya sampaikan secara ke-

seluruhan, yaitu kata kuncinya tiga yang pertama, apakah kita sudah amanah di usia kita 52 tahun, apakah kita berintegritas, apakah kita respon cepat terhadap masyarakat, perlu menanyakan kepada diri kita sendiri untuk bisa refleksikan kembali

“saya juga berharap kepada masing-masing kepala perangkat daerah turun ke lapangan, bagaimana kita melayani masyarakat dan publik di wilayah Sultra, saya titip juga di awali dengan disiplin, komitmen, moral dan melayani masyarakat lebih baik dan semakin baik lagi, karena itu adalah amanah yang harus dituntaskan”. Tutup Pj. Gubernur Sultra.(*)

Inspektorat Butur Diminta Segera Ekspose Hasil Audit Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna di Desa Langere

Laporan : Kasrun

BURANGA, BP-Inspektorat kabupaten Buton Utara diminta agar segera mengekspose hasil audit kerugian negara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) di Desa Langere pada tahun 2022 secara transparan dan akurat.

Pasalnya, mantan Kades Langere, inisial L diduga telah melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada Pembangunan Gedung Serba Guna di Desa Langere, Kecamatan Bonegunu.

Diketahui, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan audit terkait pembangunan gedung Serba Guna di Desa Langere yang diduga tidak sesuai perencanaan dan mangkrak karena semestinya pembangunan gedung serba guna tersebut harus selesai seratus Persen.

“Pada tahun 2022 mantan Kepala Desa Langere melakukan pembangunan gedung serbaguna tahap satu dengan anggaran senilai Rp.137 juta, namun pembangunan tersebut



Alwin

but diduga tidak sesuai perencanaan dan akhirnya mangkrak”, katanya Alwin, Selasa (28/11/2023).

Sehingga pekerjaan gedung serbaguna kembali dianggarkan senilai Rp. 127 juta setelah jabatan kepala Desa Langere berakhir dan dilanjutkan oleh Penjabat Kepala Desa.

Pembangunan gedung serbaguna tahap 2 kata Alwin, kembali bersumber dari dana desa anggaran 2023. Namun dari anggaran ini juga terindikasi di korupsi

“Dengan nominal anggaran yang fantastis juga pada saat prosesnya pembangunan gedung serbaguna tersebut diduga terindikasi KKN dan Mark

Up”, ujar ketua DPD LSM LIRA Butur itu.

Alwin kembali menegaskan, agar Inspektorat Kabupaten Buton Utara harus melakukan pengauditan secara transparan untuk mengetahui kerugian negara. Sehingga bisa diketahui Inspektorat bekerja secara profesional, tidak melahirkan krisis kepercayaan.

“Takutnya, dalam pengauditan maupun pemeriksaan bisa terjadi Kolusi antara pemeriksa dan yang diperiksa”, tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, kami belum bisa menghubungi Inspektur Inspektorat Buton Utara untuk dimintai tanggapannya. (*)

Inspektorat Butur ‘Bungkam’ Soal Hasil Audit Mantan Kades Langere



Laporan : Kasrun

BURANGA, BP-Terkat permintaan DPD LSM LIRA Butur, Alwin Hidayat yang meminta Inspektorat kabupaten Buton Utara segera mengekspose hasil audit kerugian negara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) di Desa Langere pada tahun 2022 secara transparan dan akurat.

Pasalnya, mantan Kades Langere, inisial L diduga telah melakukan Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (KKN) pada Pembangunan Gedung Serba Guna di Desa Langere, Keca-

matan Bonegunu.

Diketahui, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan audit

terkait pembangunan gedung Serba Guna di Desa Langere yang diduga tidak sesuai perencanaan dan mangkrak karena semestinya pembangunan gedung serba guna tersebut harus selesai seratus Persen.

Wartawan ini berkunjung di Kantor Inspektorat Buton Utara, dan berhasil bertemu dengan Sekertaris Inspektorat, Izimudin.

Namun saat ditanya terkait dugaan hasil audit inspektorat terhadap mantan kepala Desa Langere Izimudin tidak mau berkomentar.

“Kalau itu saya tidak mau”, kata Sekertaris Inspektorat sambil melambaikan tangan dari kiri ke kanan, saat ditemui di Kantornya, Rabu (29/11/0/2023). (*)

Pemkab Buton Gelar Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahap II Tahun 2023

Laporan : Ardi

BUTENG, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menggelar Diseminasi Audit Kasus Stunting tahap II dalam upaya percepatan penurunan angka Stunting di Kabupaten Buton Tengah, di Aula kantor Bupati, Selasa (21/11/2023).

Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf membuka kegiatan ini dan dihadiri Sekretaris TPPS yang juga sebagai Kadis PPKB Buteng, Abidin, yang mewakili Dandim 1413 Buton, Asisten, staf ahli, Kepala OPD, Kandepag Buteng, Tim pakar RSUD Buteng, para Camat, para Kepala UPTD se-Kabupaten Buteng, kepala KUA Kecamatan Mawasangka, Lurah Mawasangka, Kepala Desa Oengkolaki, Kepala Desa Balobone, Kepala Desa Wasilomata II, para koordinator penyuluh KB, tenaga Gizi Puskesmas Mawasangka.

Dalam arahnya Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf mengungkapkan, selaku pemerintah daerah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas terselenggaranya kegiatan ini, terkhusus kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten



Buton Tengah yang sudah bekerja maksimal sejak pelaksanaan audit kasus stunting dilapangan, yaitu disatu kelurahan dan tidak ada di kecamatan Mawasangka hingga terlaksananya diseminasi hari ini.

“Semoga melalui kegiatan ini tercipta komitmen dari seluruh pihak dan stakeholder yang hadir untuk senantiasa memaksimalkan upaya dalam pencegahan dan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Buton Tengah”, ungkapnya.

Peningkatan kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu misi tertera pada pembangunan jangka menengah nasional (RPJM) 2020-2024 dengan salah satu indikator dan target adalah prevalensi stunting yaitu 14% pada tahun 2024.

Indikator prevalensi

stunting kata Pj Bupati, Andi Muhammad Yusuf juga merupakan indikator tujuan pembangunan berkesinambungan (TPB) sustainable development goals (SDGs) khususnya pada tujuan kedua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Audit kasus stunting bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus serupa. Kegiatan audit kasus stunting merupakan kegiatan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah dengan anggaran pemerintah pusat melalui dana operasional keluarga berencana (BOKB).

Audit kasus stunting dilaksanakan dua tahap setiap tahun dan ini merupakan tahap

kedua. Setelah tahap pertama dilaksanakan di Kelurahan Watulea Kecamatan GU.

Harapan Pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah dengan kegiatan ini semua sasaran dalam pencegahan penurunan stunting mendapatkan pendampingan yang maksimal sehingga kasus stunting dan keluarga beresiko stunting mendapatkan pendampingan yang maksimal sehingga stunting di kabupaten Buton terjadi perubahan yang signifikan.

“Terimakasih kepada tim pakar dan tim teknis yang sudah bekerja sehingga dapat memberikan data perkembangan sasaran serta rekomendasi dari kegiatan AKS ini yang nantinya pemerintah daerah akan gunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan intervensi kedepan”, tutupnya. (*)

Pemkab Buton Gelar Rakor Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



Laporan: Rahman

BUTON BP-Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaludin, SPd. MSi memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Buton Tahun 2023 di Aula Kantor Bupati Buton Kompleks Perkantoran pemkab Buton, Takawa, Pasarwajo Senin, 27 November 2023.

Dalam kesempatan ini Sekda Buton mengatakan Rapat Koordinasi ini dilaksanakan atas dasar Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan

men-check atau memvalidasi kembali data real kemiskinan yang ada di desa dan kelurahan,” harap Sekda Buton.

“Kabupaten Buton masuk dalam kategori dua Kabupaten Kemiskinan terendah di Sulawesi Tenggara,” sambungnya

Mantan kadesi Sosial Kabupaten Buton ini berpesan agar capaian ini tidak serta merta membuat kita berpuas diri dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Buton.

“Saya mengajak seluruh rekan-rekan OPD selaku Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan ini karena butuh kerjasama seluruh pihak terkait,” tutup Sekda Buton. (*)

Kemiskinan Ekstrem, yang didalamnya terdapat amanat untuk menghapus kemiskinan ekstrem dengan target nol (0) persen pada tahun 2024.

Sekda juga menambahkan, tujuan dilaksanakan kegiatan rakor ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait perumusan data pusat, penerima manfaat program yang didasarkan pada data sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Kepada rekan-rekan di kecamatan untuk optimalkan peran perangkat desa dan kelurahan, optimalkan peran RT-nya, terutama dalam

Rocky Gerung Buka Suara soal Rencana PDIP Cabut Laporan di Bareskrim



Rocky Gerung respons rencana PDIP cabut laporan di Bareskrim Polri

Pewarta: Alwan

JAKARTA-- Akademi Rocky Gerung angkat suara soal rencana PDIP yang mengaku bakal mencabut laporan polisi terhadap dirinya di Bareskrim Polri.

Rocky mengaku menyambut baik rencana pencabutan laporan tersebut. Ia juga menilai PDIP akhirnya telah menyadari makna pernyataan dirinya terhadap Presiden Jokowi. "Lebih baik terlambat daripada telat nyadarnya," ujarnya kepada wartawan lewat pesan singkat, Kamis (30/11).

Sementara itu kuasa hukum Rocky, Haris Azhar mengapresiasi kepada seluruh pihak yang akhirnya mencabut laporan mereka terhadap kliennya.

Menurutnya mereka yang mencabut laporan tersebut akhirnya telah memahami dan setuju dengan pernyataan Rocky. Di sisi lain, ia juga mendukung pencabutan laporan lantaran pernyataan yang disampaikan Rocky itu menurutnya bagian dari kritik dan kebebasan berpendapat.

"Pernyataan Rocky juga harus dipahami sebagai bentuk pemahaman atas kebebasan berekspresi lebih khusus

lagi pada kritik. Demokrasi tanpa kritik ibarat nasi goreng tanpa nasi. Panas," ujarnya dalam keterangan tertulis.

"Jadi perjalanan waktu ternyata membawa pelapor kasus Rocky melihat fakta yang terungkap. Bahkan berbalik menyerang mereka. Pada titik itu, tidak ada yang lain, Rocky benar," imbuhnya.

PDIP Bakal Cabut Laporan Rocky Gerung di Bareskrim Polri

Sebelumnya perwakilan Tim Badan Bantuan Hukum Advokat Rakyat (BBHAR) DPP PDIP Johannes Tobing menyebut salah satu pertimbangan pencabutan laporan dikarenakan pihaknya merasa sepakat dengan pernyataan Rocky terhadap Presiden Joko Widodo.

"Saya putuskan untuk mencabut laporan, apa yang disampaikan saudara Rocky Gerung saya pikir lama-lama jadi benar juga," jelasnya kepada wartawan, Rabu (29/11).

Johannes menilai sikap Presiden Jokowi beberapa waktu belakangan juga telah berubah. Menurutnya, Jokowi saat ini lebih memperhatikan kepentingan pribadi dan keluarganya ketimbang

rakyat.

"Cara-cara nya Presiden Jokowi memimpin negara ini sudah tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia, cenderung demi kepentingan dirinya dan keluarganya," ujarnya.

Bareskrim Polri sendiri telah memulai proses penyidikan terhadap akademisi Rocky terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoaks terkait Presiden Joko Widodo.

Dugaan penyebaran hoaks itu berkaitan dengan pernyataan Rocky dalam acara konsolidasi akbar aliansi sejuta buruh di Islamic Center Bekasi, Sabtu (29/7) lalu. Salah satunya berkaitan dengan pernyataan Rocky soal UU Omnibuslaw yang disebut tidak berpihak kepada buruh dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Atas perbuatannya Rocky diduga melanggar Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (*)

SYL Kecewa LPSK Tolak Permohonan, Bandingkan Kasus dengan Eliezer



Syahrul Yasin Limpo menyesalkan sikap LPSK yang menolak permohonan perlindungannya. Ia membandingkan kasusnya dengan Richard Eliezer.

Laporan: Hamid

Jakarta, -- Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku kecewa terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena menolak permohonan perlindungan yang diajukannya.

Sebab, LPSK memutuskan memberikan perlindungan kepada tiga pegawai Kementerian Pertanian lainnya.

"Beliau sangat sesalkan aja, kenapa kok sampai seperti

itu. Kenapa yang lain bisa diterima, sementara beliau enggak, beliau kan saksi korban," kata pengacara SYL, Jamaluddin Koedoeboen, saat dihubungi wartawan, Kamis (30/11).

Jamaluddin pun mempertanyakan pertimbangan LPSK saat menolak permohonan kliennya.

Ia membandingkan sikap LPSK yang memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer, mantan ajudan Ferdy Sambo, meski berstatus se-

bagai tersangka di kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

"Kalau kita berangkat dari pengalaman dulu waktu kasus Pak Sambo dulu, kan ada juga yang ditahan tapi kemudian juga bisa. LPSK juga bisa melakukan perlindungan," ujar dia.

Namun, Jamaluddin mengaku Syahrul tetap menghormati dan menerima seluruh keputusan LPSK.

Sebelumnya, LPSK menolak permohonan untuk melind-

ungi Syahrul Yasin Limpo dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian Muhammad Hatta.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyebut salah satu pertimbangan menolak perlindungan karena keduanya dinilai tidak memenuhi pasal 28 ayat (1) UU Nomor 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Keduanya berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK," katanya. (*)

Saut Situmorang Diperiksa di Bareskrim Terkait Kasus Pemerasan Firli

Laporan: Hadi

JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo oleh Firli Bahuri.

Pantauan CNNIndonesia.com, Saut tiba seorang diri di Lobby Bareskrim Polri sekitar pukul 13.30 WIB. Dia mengenakan kaus hitam, blazer abu-abu, serta topi.

Kepada awak media, Saut mengaku dirinya akan dimintai keterangan oleh penyidik sebagai ahli dikarenakan sempat menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019.

Saut menyebut dalam pemeriksaan hari ini, dirinya akan memberikan keterangan soal Pasal 12 E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi



Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

terkait perbuatan gratifikasi atau suap.

"Kalau Pasal 12 E (UU Tipikor) itu kan sifatnya memaksa ya. Ya kalau bisa kan hukumannya seumur hidup," ujarnya kepada wartawan di lokasi, Kamis (30/11).

Dalam kasus ini, Saut sudah sempat diperiksa di Polda Metro Jaya saat tahap proses penyidikan. Ketika itu, Saut mengaku diperiksa untuk dimintai keterangannya soal UU KPK.

Saut mengatakan ada

ancaman pidana lima tahun penjara bagi pimpinan KPK yang bertemu pihak perkara. Hal ini merujuk pada Pasal 36 dan 65 UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Diketahui Polda Metro Jaya resmi menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, pada Rabu (22/11) malam.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya

Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya juga telah menerbitkan permohonan pengekangan keluar negeri terhadap Firli ke Dirjen Imigrasi Kemendikhum.

Ade menjelaskan berdasarkan pelbagai temuan bukti yang ada, Firli diduga melanggar Pasal 12 E dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Dalam proses penyidikan berjalan, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan tujuh orang ahli. Selain itu, sejumlah barang bukti seperti uang Rp7,4 miliar dalam pecahan Dolar Singapura dan Amerika Serikat juga telah disita. (*)

Nikah di Aula Kantor Wali Kota? Kesra dan Camat Diminta Atensi



Pewarta: Amran

BAUBAU--- Tero-bosan sosial Pj. Wali Kota Baubau Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., M.Si. yang mengundang warganya menggunakan fasilitas Aula kantor Wali Kota di Palagimata sebagai tempat pesta pernikahan warganya secara gratis, ternyata belum termanfaat-

kan. Terbukti sejak Wali Kota Dr. Rasman menyampaikan ke publik 8 November 2023 lalu, belum satupun warga yang menggunakannya, kendati bulan November-Desember ini intensitas pernikahan meningkat.

“Kami terus mensosialisasikan ke pemberitaan-pemberitaan media, sebab boleh jadi warga Kota Baubau belum terlalu banyak yang mengetahui, atau mungkin telah diked-

tahui tetapi mekanismenya yang belum tersosialisasi,” kata H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si. Kepala Dinas Kominfo Kota Baubau Selasa pagi ini. (28/11).

Pastinya, fasilitasnya gratis, ruang parkir lapang. Bahkan tawaran pribadi Dr. Rasman sebagai turut mengundang di hajatan tersebut. Mekanismenya yakni mendaftar via kantor kecamatan dengan syarat telah memenuhi kriteria pernikahan dan diutamakan yang mendapat anjuran dari pengurus masjid setempat.

“Atensi Pak Wali Kota, agar Kabag Kesra, Camat, Lurah, agar menyebarkan informasi ini ke warga. Jangan sampai warga kita ingin memanfaatkan tetapi bingung mau bertanya ke mana dan bagaimana

mekanismenya,” imbuh Andi Hamzah. Sebelumnya Pj. Wali Kota Dr. Rasman menyatakan bila Aula yang terletak di kompleks perkantoran Palagimata Baubau rencananya akan dibuka sekali setiap bulan sebagai lokasi pernikahan. Bila direspon positif, bukan tidak mungkin frekuensi pernikahan di aula ditingkatkan. Target sederhana, memudahkan warga, penghematan biaya dan sebagainya.

Program pernikahan ini tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi namun juga pada partisipasi komunal yang lebih erat di Kota Baubau. Warga diharapkan dapat merasakan keistimewaan dan kehangatan prosesi pernikahan yang diselenggarakan di jantung kota, dengan dukungan penuh dari pemerintah kota. (*)

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Sulsel dan Sultra Konservasi Malige



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Balai Kelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah 19 yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan konservasi terhadap cagar budaya yang

salah satunya adalah malige atau istana Sultan Buton yang ada di Kelurahan Tomba. Tujuan konservasi dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan cagar budaya malige atau istana Sultan yang ada di Kota Baubau.

Demikian dikatakan

Ketua tim pelestarian Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 19 Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Munafri ketika ditemui di cagar budaya Malige Kesultanan Buton Senin (27/11/2023).

Menurut Munafri, malige atau istana Sul-

Pj Sekda Saido : PPID Baubau Targetkan Jadi Kota Informatif



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU---- Pj. Sekretaris Daerah Kota Baubau Saodo Bonsai, S.Sos., M.Si. atas nama Wali Kota Baubau meminta pengelolaan informasi dan dokumen di Kota Baubau menargetkan kota ini menjadi Kota Informatif.

Hal itu diungkap Saido Bonsai saat membuka kegiatan Diseminasi Informasi dan Koordinasi Pengelolaan PPID Utama dan PPID Pelaksana yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau Selasa 28 November 2023.

“PPID Utama dan PPID Pelaksana harus berkomitmen menjadikan Kota Baubau sebagai Kota Informatif, itu visi besar kita, dan pak Wali Kota berkomitmen besar sekaligus telah menunjukkan bagaimana pentingnya penyaluran informasi ke publik,” kata Saido Bonsai dihadapan 50-an sekretaris dan Kabag se Kota Baubau.

Terkait hal tersebut, para Sekretaris OPD dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah sebagai pengampu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) harus lebih berperan aktif karena Tupoksi ini melekat

di jabatan para Sekretaris dan Kabag, dan pimpinan OPD harus berkomitmen dan memberi ruang besar penyuksesan tugas-tugas PPID.

Dijelaskan Sekda, Diskominfo sebagai instrumen PPID Utama dan OPD sebagai PPID Pelaksana adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga pemenuhan informasi publik sebagai perintah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat terwujud dengan baik.

Wali Kota melalui Sekda menekankan 5 (lima) hal terkait PPID, masing-masing; pertama, PPID Utama yang berkedudukan pada Diskominfo Kota Baubau harus lebih aktif dan mutakhir dalam menyalurkan informasi Publik. Kedua, PPID Pelaksana yang berkedudukan di masing-masing OPD dan BUMD harus aktif menyiapkan, mendokumentasikan, menyimpan, menguji, dan

menyalurkan Informasi ke Publik lebih optimal sesuai dengan SOP yang telah di buat atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketiga, Kolaborasi dan koordinasi Data dan Informasi dari OPD ke Diskominfo untuk dipublikasi telah berjalan secara mandiri sebagai satu tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keempat, PPID utama dan PPID pelaksana agar melakukan identifikasi dan klasifikasi informasi serta menyusun daftar informasi publik.

Dan kelima, Pada tahun 2024, semua hal yang berkaitan dengan PPID telah terselesaikan dan berjalan dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Kadis Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si saat menyampaikan paparan-

nya dihadapan peserta diseminasi, memberi jaminan bila tahun 2024 dan 2025, peran PPID lebih maksimal, informasi ke publik juga diintensifkan, serta kelembagaan Diskominfo terus berkolaborasi dengan OPD mewujudkan visi Kota Informatif.

Andi Hamzah secara umum menyampaikan materi pengelolaan informasi daerah, meminta PPID Pelaksana berkomitmen agar distribusi informasi terus digerakkan setiap harinya, agar masyarakat benar-benar mendapatkan hak informasi secara layak. “Apalagi Pak Wali Kota, tak ingin ada sekat yang lebar antara informasi kinerja pemerintah dengan kebutuhan informasi publik,” tandasnya.

Materi teknis lainnya disajikan Dr. Hamzah, S.H., M.Ikom. “Sekretaris Diskominfo Baubau tentang teknis pengelolaan PPID Utama dan PPID Pelaksana, sementara diskusi PPID dipandu langsung Kabid Pengelola Informasi dan Komunikasi Diskominfo” Muhammad Said Idu, SP. (*)

tan merupakan salah satu dari cagar budaya yang ada di Kota Baubau yang di konservasi oleh BPK wilayah 19 Sulsel dan Sultra. Ini merupakan langkah kedua setelah 4 atau 5 tahun lalu melakukan kegiatan yang sama.

Konservasi itu meliputi kegiatan pembersihan, konsolidasi, pengawetan, kamouflage dan lain sebagainya.

“Sebelum kegiatan konservasi ini dilakukan itu, kami datang lebih awal untuk mengobservasi jenis-jenis kerusakan dan pelaporan yang terjadi pada bangunan Istana Malige ini, setelah itu kami buat proposalnya, RAB

nya, sehingga ketika melakukan suatu kegiatan itu betul-betul bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan konservasi,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk malige atau istana Sultan sudah dimulai dilakukan pelaksanaan tahap awal yakni dengan pembuatan larutan perosonal dilakukan pembersihan secara tradisional yaitu dengan bahan cengek, tembakau, dan beer lalu dilarutkan dalam air. Kemudian drendam selama 24 jam setelah itu diperas. Ekstraknya itulah yang akan dioleskan pada kayu-kayu pada

Istana Malige ini. Sehingga, 10 hari kedepan, akan melakukan kegiatan konservasi yang dimulai dari lantai 4, 3, 2, 1 yang kesemuanya akan digosok dengan bahan yang sudah dilarutkan terlebih dahulu. Munafri berharap dengan konservasi terhadap rumah atau istana malige ini tetap awet, tetap bagus, tidak rusak. Karena kalau tidak dicegah maka akan rusak atau lapuk oleh rayap.

Kemudian saya bicara tadi dengan pak Lurah Tomba Ari Wijaya bahwa Alhamdulillah sangat responsif terhadap kegiatan ini, bahkan beliau men-

gatakan bahwa kalau bisa kegiatan ini bukan hanya daerah sini, di malige juga dilakukan, tetapi di cagar budaya yang ada di Kota Baubau ini. Saya tidak berjanji tapi ini adalah penyelenggaraan pusat oleh karena itu saya jelaskan bahwa ketika ada informasi daripada pemerintah atau masyarakat itu akan kami tindak lanjuti dengan pengurusan proposal anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan yang ada di Pusat bahwa Istana Malige ini adalah cagar Budaya yang sudah dilindungi, tutupnya. (*)